

BAB I

PENDAHULUAN

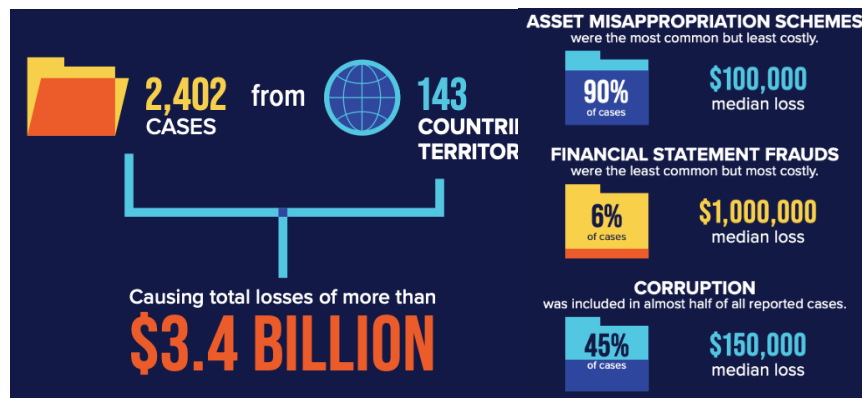
1.1 Latar Belakang Penelitian

Pengelolaan laporan keuangan merupakan aspek fundamental dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan suatu entitas, baik di sektor publik maupun swasta (Widiyantara et al., 2024). Laporan keuangan berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban manajemen kepada pemangku kepentingan sekaligus sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi. Dalam konteks keuangan negara dan korporasi nasional, kualitas pencatatan dan pelaporan keuangan mencerminkan tingkat transparansi, akuntabilitas, serta integritas tata kelola yang diterapkan (Widiyantara et al., 2024). Menurut *International Financial Reporting Standards Foundation*, kualitas informasi keuangan sangat menentukan tingkat kepercayaan pengguna laporan (Andriyani & Yuniningsih, 2025). Pada penelitian oleh (Afriani & Trisnawati, 2025), disebutkan pernyataan oleh Dechow et al. (2010) yang menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan menjadi indikator utama dalam menilai transparansi dan kinerja perusahaan (Afriani & Trisnawati, 2025). Namun demikian, konflik kepentingan antara manajemen dan pemilik seringkali memicu distorsi informasi dalam laporan keuangan.

Di Indonesia telah ditetapkan berbagai regulasi untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan perusahaan, termasuk peraturan mengenai standar akuntansi dan kewajiban pelaporan yang komprehensif untuk entitas publik dan swasta (Basyar et al., 2024a). Standar Akuntansi oleh Ikatan Akuntan Indonesia dan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan menjadi landasan utama dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan publik di Bursa Efek

Indonesia (Sevi et al., 2021). Namun demikian, dalam praktiknya, perusahaan cenderung berupaya menampilkan kinerja keuangan yang optimal dalam laporan yang dipublikasikan. Pelaporan dalam laporan keuangan seringkali tidak menggambarkan kondisi aktual keuangan perusahaan secara akurat, melainkan dirancang untuk menciptakan citra positif di kalangan pemangku kepentingan (Abbas et al., 2020). Kondisi ini menimbulkan tekanan pada manajemen dan pihak-pihak terkait lainnya untuk mempertahankan kesan kinerja yang kuat, sehingga berpotensi memicu praktik-praktik manipulatif, terutama terkait laporan keuangan tertentu. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam implementasi pengawasan dan pengendalian terhadap pelaporan keuangan. Pada akhirnya, kondisi ini dapat mengarah pada munculnya kecurangan berupa *Financial Statement Fraud* yang merupakan salah satu bentuk *fraud* dengan dampak kerugian yang signifikan.

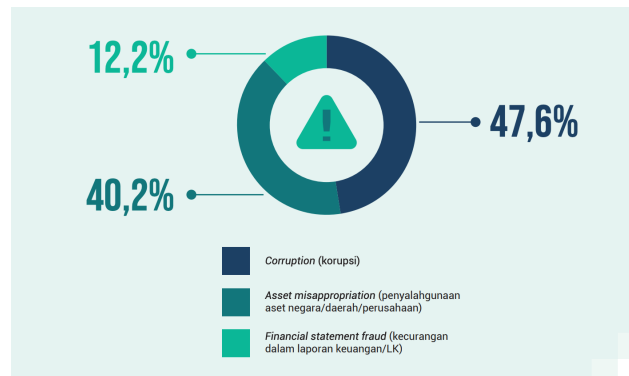
Menurut Lembaga *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE), *fraud* atau kecurangan adalah suatu tindakan penipuan yang dilakukan individu atau kelompok secara sengaja dan sadar memahami hal ini dapat menimbulkan kejadian tidak diinginkan dan merugikan individu, entitas, atau pihak lain (Nurdiana & Khusnah, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa *fraud* bukan hanya masalah teknis akuntansi, tetapi juga sehubungan dengan perilaku, serta motivasi individu dalam organisasi. Secara umum, *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) membagikan *occupational fraud* ke dalam tiga kategori, yaitu penyalahgunaan aset (*asset misappropriation*), korupsi (*corruption*), dan kecurangan laporan keuangan (*financial statement fraud*).



Gambar 1.1 Occupational Fraud: A Report to the Nations

Sumber: (Occupational Fraud, 2026)

Laporan *Occupational Fraud: A Report to the Nations* edisi ke-14 yang diterbitkan pada tahun 2026 ini menganalisis 2.402 kasus *occupational fraud* dengan total kerugian yang tercatat melebihi USD 3,4 miliar (Occupational Fraud, 2026). Kecurangan laporan keuangan merupakan jenis *fraud* yang paling jarang ditemukan dengan proporsi hanya sebesar 6% dari total kasus yang diteliti. Meskipun demikian, kategori ini menimbulkan dampak kerugian terbesar dibandingkan jenis *fraud* lainnya, dengan median kerugian mencapai USD 1.000.000 per kasus (Occupational Fraud, 2026). Temuan tersebut menunjukkan bahwa meskipun frekuensi terjadinya relatif rendah, *financial statement fraud* memiliki konsekuensi finansial yang sangat signifikan bagi organisasi sehingga memerlukan perhatian dan upaya pencegahan yang lebih intensif.



Gambar 1.2 Bentuk *Occupational Fraud* Yang Sering Terjadi di Indonesia

Sumber: (ACFE Indonesia, 2025)

Berdasarkan Survei *Fraud* Indonesia 2025 oleh ACFE Indonesia, diketahui bahwa kecurangan laporan keuangan menyumbang sekitar 12,2% dari total kasus *fraud* di Indonesia. Selain itu, nilai kerugian yang ditimbulkan tergolong besar, yaitu berkisar antara Rp1 miliar hingga Rp50 miliar per kasus (ACFE Indonesia, 2025). Fenomena kecurangan tidak hanya terjadi pada satu sektor tertentu, melainkan tersebar di berbagai sektor industri dengan karakteristik risiko yang berbeda-beda. Kasus *fraud* banyak ditemukan pada beberapa sektor.



Gambar 1.3 Industri Yang Terdampak *Occupational Fraud*

Sumber: (ACFE Indonesia, 2025)

Perusahaan konstruksi yang merupakan bagian inti dari industri infrastruktur menempati posisi kedua tertinggi dalam kejadian *occupational fraud* di Indonesia dengan proporsi sebesar 14% (ACFE Indonesia, 2025). Tingginya kasus *fraud* di sektor ini umumnya disebabkan oleh nilai proyek yang sangat besar, proses pengadaan yang kompleks, serta keterlibatan banyak pihak sehingga membuka peluang terjadinya *mark-up* anggaran dan kolusi (Asih et al., 2025). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa setiap sektor memiliki faktor risiko yang berbeda, namun pada dasarnya dipengaruhi oleh kombinasi tekanan, peluang, serta kelemahan sistem pengendalian.

Sektor infrastruktur termasuk dalam industri yang terdampak *fraud* dengan tingkat yang cukup signifikan (ACFE Indonesia, 2025). Sektor infrastruktur menjadi salah satu sektor strategis di perekonomian Indonesia yang tidak hanya berperan dalam memperkuat konektivitas wilayah dan efisiensi logistik, tetapi juga berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2024, kontribusi sektor konstruksi dan infrastruktur terhadap PDB Indonesia pada tahun 2023 menempati urutan kelima dengan kontribusi sebesar 9,9% (Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, 2024). Perkembangan sektor infrastruktur di Indonesia juga menunjukkan tren yang semakin meningkat, terutama sejak pemerintah menggiatkan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN), yang dalam dua periode terakhir mencatat 233 PSN dengan total nilai investasi mencapai Rp6.246 triliun (Nicholas Martua Siagian, 2025). Selain itu, sektor transportasi dan perdagangan sebagai komponen utama ekosistem infrastruktur, mengalami pertumbuhan tertinggi di antara seluruh sektor pada tahun

2022 dan 2023, yaitu di kisaran 15%, yang turut mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan (Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, 2024).

Sektor infrastruktur memiliki karakteristik yang unik dalam mendukung pengembangan dan produktivitas ekonomi suatu negara. Pembangunan infrastruktur berkontribusi terhadap peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, serta pemerataan pembangunan antar daerah (Rahayu et al., 2026). Dalam penelitian oleh Parulian dan Mahendra (2022), menunjukkan bahwa peningkatan investasi infrastruktur berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) serta daya saing nasional (Parulian & Mahendra, 2022). Dengan demikian, sektor ini menjadi salah satu sektor strategis yang memainkan peran penting dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Namun demikian, di balik peran strategis tersebut, sektor infrastruktur juga memiliki risiko tinggi terhadap praktik kecurangan (*fraud*), khususnya dalam pengelolaan keuangan. Karakteristik proyek yang bernilai besar, melibatkan banyak pihak, serta proses pengadaan yang kompleks membuka peluang terjadinya manipulasi dan penyimpangan. Praktik *fraud* dalam sektor ini seringkali terjadi dalam bentuk *mark-up* anggaran, penggelembungan biaya proyek, hingga manipulasi laporan keuangan untuk menutupi kondisi sebenarnya (Hardinata & Hardinata, 2024).

Fenomena kecurangan laporan keuangan pada perusahaan sektor infrastruktur telah terjadi di Indonesia, khususnya pada perusahaan konstruksi yang menghadapi tekanan keuangan akibat proyek berskala besar dan kompleks. Salah satu contoh kasus yang mencerminkan adanya indikasi manipulasi laporan

keuangan terjadi pada PT Waskita Karya (Persero) Tbk, yang mengalami permasalahan keuangan serius akibat tingginya beban utang serta ketidaksesuaian dalam pengelolaan proyek (Raihandika & Sudrajad, 2025). Berdasarkan hasil investigasi, BPKP menduga rekayasa laporan keuangan PT Waskita Karya telah berlangsung sejak tahun 2016 melalui taktik menyembunyikan tagihan dari vendor, sehingga beban utang terlihat menciut dan kondisi keuangan tampak sehat (BPKP, 2023). Skandal ini juga melibatkan rekayasa pengakuan pendapatan, penggunaan kontrak fiktif, serta pencatatan transaksi yang tidak sesuai kondisi riil, yang mengakibatkan kerugian PT Waskita Karya diperkirakan mencapai Rp830,63 miliar (CNBC Indonesia, 2023). Kondisi tersebut mendorong perusahaan untuk melakukan berbagai upaya dalam menjaga citra kinerja keuangan di mata investor dan kreditur.

Tingginya kasus *financial statement fraud*, menunjukkan bahwa kecurangan laporan keuangan masih menjadi permasalahan serius yang dihadapi perusahaan. Praktik ini tidak hanya merugikan investor dan kreditur yang menggunakan laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan, tetapi juga dapat menurunkan kredibilitas perusahaan serta mengurangi kepercayaan publik terhadap pasar modal. Oleh karena itu, perusahaan perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai faktor yang dapat mendorong terjadinya kecurangan laporan keuangan agar tindakan pencegahan dapat dilakukan secara lebih efektif. Dalam upaya memahami dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecurangan laporan keuangan, berbagai teori *fraud* telah dikembangkan oleh para peneliti. Teori-teori tersebut berupaya menjelaskan

kondisi yang mendorong individu maupun manajemen melakukan tindakan kecurangan

Berbagai teori telah dikembangkan untuk menjelaskan penyebab terjadinya *fraud*, mulai dari teori yang paling sederhana hingga teori yang lebih komprehensif sesuai dengan perkembangan praktik bisnis dan kompleksitas organisasi modern. Teori pertama yang menjadi fondasi adalah *Fraud Triangle Theory* yang dikemukakan oleh Cressey (1953). Teori ini menjelaskan bahwa kecurangan muncul akibat kombinasi tiga kondisi, yaitu tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*). *Fraud Triangle* menjadi teori paling luas diterima dalam kajian awal mengenai *fraud* karena mampu menjelaskan motivasi dasar pelaku secara konseptual dan sederhana. Namun, *Fraud Triangle* dianggap belum sepenuhnya menjelaskan kompleksitas kecurangan di lingkungan organisasi yang lebih modern, sehingga Wolfe dan Hermanson (2004) mengembangkan *Fraud Diamond Theory* dengan menambahkan elemen keempat, yaitu kapabilitas (*capability*). Penambahan elemen ini didasarkan pada pemikiran bahwa tidak semua individu yang memiliki tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi akan mampu mengeksekusi kecurangan tanpa memiliki kemampuan dan posisi yang memadai dalam perusahaan.

Perkembangan lebih lanjut melahirkan *Fraud Pentagon Theory* yang diperkenalkan oleh Crowe Horwath (2011) dengan menambahkan elemen kelima, yaitu arogansi (*arrogance*), yang mencerminkan sikap superioritas atau rasa tidak dapat tersentuh yang dimiliki pelaku berkuasa. Pada perkembangan yang lebih baru, Georgios L. Vousinas (2019) memperkenalkan *Fraud Hexagon Theory*

(SCORE) dengan menambahkan elemen keenam, yaitu kolusi (*collusion*), yang mengakui bahwa kecurangan yang kompleks seringkali melibatkan kerja sama antar beberapa pihak. Meskipun demikian, *Fraud Hexagon* masih relatif baru dan keterbatasan proksi yang terukur untuk elemen kolusi menjadikannya lebih sulit diuji secara empiris pada data laporan keuangan perusahaan publik.

Berdasarkan uraian perkembangan teori di atas, penelitian ini memilih untuk menggunakan *Fraud Pentagon Theory* dibandingkan dengan *Fraud Hexagon Theory* karena elemen kolusi masih sulit diproksikan secara konsisten dalam data publik yang tersedia. Penggunaan *Fraud Pentagon Theory* dianggap sudah cukup untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berpotensi memengaruhi terjadinya *financial statement fraud*. Meskipun demikian, hasil penelitian terdahulu yang menguji kelima elemen tersebut, yaitu *pressure*, *opportunity*, *rationalization*, *capability*, dan *arrogance*, terhadap *financial statements fraud* masih menunjukkan temuan yang beragam. Perbedaan temuan tersebut menunjukkan bahwa faktor-faktor dalam *Fraud Pentagon Theory* masih memerlukan pengujian lebih lanjut.

Dalam *fraud pentagon theory*, tekanan menjadi faktor penting karena semakin tinggi tuntutan yang dihadapi, maka semakin besar kemungkinan manajemen melakukan tindakan *fraud*. Tekanan dapat berasal dari target keuangan, kondisi keuangan perusahaan, maupun tekanan eksternal. *Pressure* atau tekanan merupakan kondisi ketika manajemen menghadapi tuntutan tertentu, baik dari internal maupun eksternal perusahaan, seperti target laba, stabilitas keuangan, serta ekspektasi investor dan kreditur. Tekanan ini dapat mendorong manajemen untuk melakukan manipulasi laporan keuangan agar perusahaan tetap terlihat memiliki

kinerja yang baik. Penelitian terdahulu yang membahas terkait tekanan ini menunjukkan hasil yang beragam.

Sebuah penelitian oleh Basmar & Sulfati (2022) menyatakan bahwa tekanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan (Basmar & Sulfati, 2022). Hasil serupa juga ditemukan oleh Damarjati & Yulianti (2025) dan Basyar et al. (2024) yang menunjukkan bahwa *pressure* yang diprosikan dengan tekanan luar memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan (Basmar & Sulfati, 2022; Damarjati & Yulianti, 2025). Namun, penelitian oleh Dewi & Yuliati (2022) dan Wicaksono et al (2023) menunjukkan bahwa tekanan eksternal berpengaruh negatif signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan (Dewi & Yuliati, 2022; Wicaksono et al., 2023). Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya inkonsistensi temuan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk membuktikan apakah *pressure* berpotensi mempengaruhi kecurangan laporan keuangan.

Selanjutnya, peluang atau *opportunity* juga menjadi faktor yang memungkinkan tindakan manipulasi dilakukan tanpa mudah terdeteksi. Semakin lemah sistem pengendalian internal, maka semakin besar peluang terjadinya *fraud*. *Opportunity* atau kesempatan merupakan kondisi yang memberikan peluang bagi individu untuk melakukan kecurangan akibat lemahnya sistem pengendalian internal, kurangnya pengawasan, serta adanya celah dalam sistem perusahaan.

Penelitian oleh Nurdiana & Khusnah (2023) dan Wicaksono et al (2023), menunjukkan bahwa kesempatan berpengaruh positif, namun tidak signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan, artinya peluang yang diprosikan dengan

ineffective monitoring belum tentu meningkatkan terjadinya kecurangan laporan keuangan (Nurdiana & Khusnah, 2023; Wicaksono et al., 2023). Di sisi lain, penelitian oleh Islamiati & Putra (2024) menunjukkan bahwa kesempatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan, dimana semakin tingginya pengawasan akan menurunkan kemungkinan terjadinya kecurangan laporan keuangan (Islamiati & Putra, 2024). Namun demikian, temuan dari Burlacu et al. (2025) mengindikasikan bahwa elemen opportunity yang diukur melalui indikator *ineffective monitoring* tidak memberikan dampak signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan (Burlacu et al., 2025). Ketidakkonsistenan hasil riset tersebut menandakan bahwa pengaruh faktor peluang masih perlu dikaji lebih lanjut. Atas dasar itulah, studi ini dirancang untuk membuktikan sejauh mana opportunity berimplikasi pada praktik kecurangan pelaporan keuangan

Selanjutnya, rasionalisasi menjadi faktor psikologis yang memungkinkan individu tetap merasa benar meskipun melakukan tindakan *fraud*. Rasionalisasi sering muncul sebagai bentuk pembenaran atas tekanan yang dihadapi perusahaan. Rasionalisasi merepresentasikan pola pikir pembenaran diri oleh pelaku atas praktik kecurangan yang diperbuat. Dalam sudut pandang ini, manipulasi finansial dipersepsikan sebagai tindakan yang lumrah atau dapat dimaklumi. Pola ini diukur menggunakan indikator pergantian auditor, dengan asumsi bahwa pergantian tersebut mampu meminimalkan potensi terdeteksinya manipulasi laporan keuangan dari periode sebelumnya. Dengan adanya auditor baru, pemahaman terhadap kondisi perusahaan dan riwayat pelaporan keuangan memerlukan waktu

penyesuaian, sehingga peluang untuk melakukan kecurangan laporan keuangan menjadi lebih besar.

Penelitian oleh Wicaksono et al. (2023) menunjukkan bahwa rasionalisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan (Wicaksono et al., 2023). Hasil ini juga didukung oleh penelitian Isu dan Sofie (2025) yang menemukan bahwa rasionalisasi berpengaruh positif signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan (Isu & Sofie, 2025). Namun, penelitian oleh Damarjati dan Yulianti (2025) menunjukkan bahwa rasionalisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan (Damarjati & Yulianti, 2025). Dengan adanya perbedaan hasil penelitian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk membuktikan apakah *rationalization* berpotensi mempengaruhi kecurangan laporan keuangan.

Lalu, kemampuan atau kapabilitas juga menjadi faktor yang berkaitan dengan kemampuan individu dalam melakukan dan menyembunyikan tindakan kecurangan. Kapabilitas memungkinkan pelaku untuk memahami sistem perusahaan secara mendalam serta memanfaatkan celah yang ada tanpa mudah terdeteksi. *Capability* atau kapabilitas merupakan kemampuan, keahlian, serta posisi strategis yang dimiliki oleh individu sehingga memungkinkan dirinya melakukan dan menyembunyikan kecurangan. Pelaku dengan kompetensi tinggi cenderung memiliki akses yang lebih luas terhadap sistem dan informasi perusahaan, sehingga peluang untuk melakukan manipulasi menjadi lebih besar.

Penelitian oleh Isu dan Sofie (2025) menunjukkan bahwa kapabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan (Isu &

Sofie, 2025). Hasil ini juga didukung oleh penelitian Huang et al. (2025) yang menemukan bahwa perubahan direksi sebagai proksi kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan (Huang et al., 2025). Disisi lain, penelitian oleh Fernanda dan Susilo (2025) menunjukkan bahwa *capability* berpengaruh negatif signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan, dimana jika terdapat pergantian direksi maka kecenderungan terjadinya kecurangan laporan keuangan semakin rendah karena kompetensi dari direksi tersebut (Fernanda & Susilo, 2025). Dengan adanya perbedaan hasil penelitian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk membuktikan apakah kapabilitas berpotensi mempengaruhi kecurangan laporan keuangan.

Faktor terakhir dalam *Fraud Pentagon Theory* adalah arogansi (*arrogance*), yaitu sikap superioritas atau keyakinan berlebihan yang dimiliki individu sehingga merasa dirinya memiliki kekuasaan dan kendali yang lebih besar dibandingkan pihak lain dalam organisasi. Sikap tersebut dapat mendorong seseorang untuk mengabaikan aturan, prosedur, maupun mekanisme pengendalian internal yang berlaku karena meyakini bahwa tindakannya tidak akan terdeteksi atau tidak akan menimbulkan konsekuensi yang merugikan dirinya. Dalam konteks perusahaan, arogansi umumnya dikaitkan dengan manajemen puncak yang memiliki pengaruh besar dalam proses pengambilan keputusan dan penyusunan laporan keuangan. Arogansi dapat diproksikan dengan frekuensi kemunculan foto CEO (*CEO's Picture*) dalam laporan tahunan perusahaan. Semakin banyak foto CEO yang ditampilkan, semakin besar kemungkinan adanya keinginan untuk menunjukkan kekuasaan, dominasi, atau citra diri kepada para pemangku kepentingan.

Penelitian Dewi dan Yuliati (2022) menemukan bahwa frekuensi foto CEO sebagai proksi arogansi berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan (Dewi & Yuliati, 2022). Namun, penelitian oleh Damarjati dan Yulianti (2025) menunjukkan bahwa arogansi berpengaruh negatif signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan, yang artinya semakin tinggi superioritas dari manajemen puncak, maka kecurangan laporan keuangan dapat dikendalikan (Damarjati & Yulianti, 2025). Dengan adanya perbedaan hasil penelitian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk membuktikan apakah *arrogance* berpotensi mempengaruhi kecurangan laporan keuangan.

Secara praktis, manipulasi laporan keuangan tidak semata-mata bersumber dari dorongan internal eksekutif, melainkan turut ditentukan oleh efektivitas mekanisme pengawasan organisasi. Oleh sebab itu, penerapan *good corporate governance* (GCG) memegang peranan krusial dalam studi ini sebagai instrumen kendali yang mampu membatasi ruang gerak manajemen untuk berbuat curang. Pada dasarnya, tata kelola perusahaan merupakan kerangka kerja yang menyelaraskan interaksi antara direksi, dewan komisaris, pemegang saham, serta pemangku kepentingan lainnya guna menegakkan transparansi, akuntabilitas, dan kontrol pengelolaan yang optimal (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2023). Penerapan tata kelola perusahaan yang baik diyakini dapat meminimalkan asimetri informasi antara manajemen dan pemegang saham, sehingga mengurangi peluang terjadinya manipulasi laporan keuangan.

Salah satu indikator utama dalam pengukuran kualitas tata kelola perusahaan adalah pengungkapan informasi dalam laporan tahunan perusahaan. Pengungkapan

merupakan penyampaian informasi yang relevan, lengkap, dan transparan kepada seluruh pemangku kepentingan sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen atas pengelolaan perusahaan (Healy & Palepu, 2000). Semakin tinggi tingkat pengungkapan yang dilakukan perusahaan, maka semakin kecil ruang bagi manajemen untuk menyembunyikan informasi yang bersifat material atau melakukan rekayasa terhadap kondisi keuangan yang sebenarnya. Hal ini sejalan dengan prinsip transparansi dalam *Good Corporate Governance* (GCG) yang mewajibkan perusahaan untuk menyediakan informasi yang akurat, tepat waktu, dan mudah diakses oleh seluruh pihak yang berkepentingan. Dalam konteks perusahaan publik di Indonesia, kewajiban pengungkapan diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menetapkan standar minimum informasi yang harus disampaikan dalam laporan tahunan maupun laporan keuangan berkala.

Hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh pengungkapan sebagai proksi tata kelola perusahaan terhadap kecurangan laporan keuangan masih menunjukkan temuan yang terbatas. Terdapat Penelitian oleh Pangestu (2021) menemukan bahwa tata kelola perusahaan berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan pada perusahaan publik di Indonesia. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin baik mekanisme tata kelola perusahaan, maka semakin rendah potensi terjadinya kecurangan laporan keuangan (Pangestu, 2021). Selanjutnya, penelitian Savitri dan Herliansyah (2022) menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance* berpengaruh signifikan terhadap penyalahgunaan aset. Akan tetapi, fokus penelitian tersebut terbatas pada *asset misappropriation* di sektor perbankan, bukan pada kecurangan laporan keuangan (Savitri & Herliansyah, 2022). Selain itu, penelitian

As'ad dan Sulistyowati (2026) membuktikan bahwa *Good Corporate Governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan, tetapi temuan tersebut lebih menekankan pada *fraud prevention* di perusahaan pertambangan, bukan pada indikasi manipulasi laporan keuangan (As'ad & Sulistyowati, 2026). Dengan adanya keterbatasan penelitian terdahulu tersebut, penelitian ini dilakukan untuk membuktikan apakah tata kelola perusahaan berpotensi mempengaruhi kecurangan laporan keuangan.

Berdasarkan kasus dan berbagai permasalahan yang telah dijelaskan, diketahui bahwa kecurangan laporan keuangan menjadi permasalahan kompleks dan memerlukan analisis yang komprehensif. Tingginya risiko *fraud* di Indonesia pada sektor Infrastruktur, didukung adanya kasus pada PT Waskita Karya Tbk, menunjukkan manipulasi masih menjadi ancaman nyata terhadap kredibilitas laporan keuangan. Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat judul **“PENGARUH FRAUD PENTAGON DAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERHADAP KECURANGAN LAPORAN KEUANGAN”** untuk membedah secara konkret faktor-faktor yang mendorong terjadinya *financial statement fraud*.

1.2 Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, terlihat bahwa kecurangan laporan keuangan merupakan permasalahan yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Tingginya kasus *fraud* di berbagai sektor menunjukkan bahwa praktik manipulasi laporan keuangan masih menjadi ancaman terhadap kredibilitas informasi keuangan. Dalam penelitian ini, faktor-faktor penyebab kecurangan laporan keuangan dijelaskan melalui *Fraud Pentagon Theory*

yang mencakup tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*), rasionalisasi (*rationalization*), kapabilitas (*capability*), dan arogansi (*arrogance*) sebagai elemen yang dapat mendorong manajemen melakukan tindakan manipulatif. Selain faktor-faktor tersebut, tata kelola perusahaan juga berperan penting dalam memperkuat sistem pengawasan, meningkatkan transparansi, serta membatasi peluang manajemen untuk melakukan tindakan oportunistik yang dapat mengarah pada kecurangan laporan keuangan. Namun, hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh *Fraud Pentagon* dan tata kelola perusahaan terhadap kecurangan laporan keuangan masih menunjukkan ketidakkonsistenan serta keterbatasan pada objek, periode, dan proksi penelitian yang digunakan. Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan tersebut, maka dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah tekanan (*Pressure*) yang diproksikan dengan *Leverage* memiliki pengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan?
2. Apakah peluang (*Opportunity*) yang diproksikan dengan ketidakefektifan pengawasan (*Ineffective Monitoring*) memiliki pengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan?
3. Apakah rasionalisasi (*Rationalization*) yang diproksikan dengan pergantian auditor (*Change of Auditor*) memiliki pengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan?
4. Apakah kapabilitas (*Capability*) yang diproksikan dengan pergantian direksi (*Change of Director*) memiliki pengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan?

5. Apakah arogansi (*Arrogance*) yang diproksikan dengan melalui frekuensi foto CEO (*Frequent Number of CEO's Picture*) memiliki pengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan?
6. Apakah Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Government*) yang diproksikan dengan melalui Pengungkapan Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance Disclosure*) memiliki pengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian yang telah diuraikan, tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh dari tekanan (*Pressure*) terhadap kecurangan laporan keuangan
2. Mengetahui pengaruh dari peluang (*opportunity*) terhadap kecurangan laporan keuangan
3. Mengetahui pengaruh dari rasionalisasi (*rationalization*) terhadap kecurangan laporan keuangan
4. Mengetahui pengaruh kapabilitas (*capability*) terhadap kecurangan laporan keuangan
5. Mengetahui pengaruh dari arogansi (*arrogance*) terhadap kecurangan laporan keuangan
6. Mengetahui pengaruh dari tata kelola perusahaan (*good corporate governance*) terhadap kecurangan laporan keuangan

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, studi ini diharapkan memperluas cakupan literatur mengenai financial statement fraud, khususnya pada korporasi di Indonesia. Sumbangsih utama penelitian ini terletak pada penguatan basis konseptual *Agency Theory* (Jensen & Meckling, 1976) melalui pembuktian empiris. Pengujian dilakukan untuk melihat bagaimana konflik keagenan, yang termanifestasi lewat tekanan, kesempatan, rasionalisasi, kapabilitas, arogansi, serta *good corporate governance*, memengaruhi potensi kecurangan laporan keuangan di sektor infrastruktur. Dengan demikian, temuan ini memperkaya wawasan mengenai kecenderungan oportunistic agent sekaligus menegaskan fungsi tata kelola sebagai instrumen pengawasan dalam memitigasi manipulasi finansial.

Di samping itu, kajian ini melengkapi khazanah keilmuan mengenai *Fraud Pentagon Theory* dengan membuktikan keberlakuan kelima dimensinya pada entitas infrastruktur yang tercatat di BEI. Temuan ini juga memperluas wawasan akademis di bidang *good corporate governance* (GCG), terutamanya terkait efektivitas pengawasan dalam menekan potensi manipulasi finansial. Oleh karena itu, penelitian ini layak dijadikan rujukan bagi studi mendatang yang ingin menguraikan kecurangan pelaporan keuangan menggunakan sintesis pelbagai teori dalam satu kerangka analisis yang utuh.

1.4.2 Manfaat Praktis

Temuan penelitian ini memberikan kontribusi praktis bagi pihak manajemen dalam memetakan celah pengawasan, sehingga penguatan sistem kendali internal dan tata kelola dapat terealisasi:

1. Untuk Perusahaan, khususnya di bidang infrastruktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI), temuan studi ini dapat dijadikan acuan strategis untuk membenahi fungsi tata kelola serta mengoptimalkan transparansi laporan keuangan. Selain itu, hasil kajian ini memfasilitasi manajemen dalam mendeteksi berbagai pemicu kecurangan, seperti dorongan eksternal, minimnya pengawasan, hingga tindakan oportunistik eksekutif, sehingga mekanisme pencegahan dapat dirumuskan secara lebih cermat
2. Untuk investor dan pemangku kepentingan, temuan ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan bagi investor dan pemangku kepentingan dalam menilai tingkat risiko kecurangan laporan keuangan pada perusahaan. Selain itu, informasi mengenai tata kelola perusahaan dalam pengawasan pelaporan keuangan dapat menjadi pertimbangan dalam mengevaluasi kualitas dan kredibilitas informasi keuangan perusahaan, sehingga investor dapat mengambil keputusan investasi yang lebih tepat dan rasional.
3. Untuk Regulator, temuan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi regulator dalam meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap pelaporan keuangan perusahaan serta dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan fungsi dan efektivitas tata kelola perusahaan. Dengan demikian,

upaya pencegahan dan deteksi kecurangan laporan keuangan dapat dilakukan secara lebih optimal.

